

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai upaya pengejawantahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu kepada pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merasa perlu memiliki dokumen perencanaan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis kinerja. Dokumen perencanaan dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berorientasi waktu perencanaan 20 tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah dimulai dari adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003, yaitu pembangunan yang berorientasi publik dan berbasis kinerja.

Selanjutnya, komitmen KDH dan Wakil KDH akan menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJP, di samping itu juga mengacu kepada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi (RPJP Provinsi) dan Pemerintah Pusat (RPJP Nasional) guna menjamin sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Kemudian, karena dokumen RPJP berfungsi sebagai dokumen publik yang akan merangkum rencana kegiatan dua puluh tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan dokumen perencanaan ini juga telah dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat/pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Selain itu, RPJP ini juga disusun dengan memperhatikan kondisi statistik regional dan lokal, terutama data tentang PDRB dan (1) statistik berbagai fungsi

pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat; (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah; dan (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Semua data statistik tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui kondisi riil setiap bidang sehingga mudah untuk menentukan proyeksi perubahan yang diharapkan dua puluh tahun ke depan.

Di samping itu, data statistik tersebut selanjutnya dirinci dan dipertajam oleh masing-masing SKPD dalam Renstra SKPD. Dengan demikian maka penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat beserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya selama kurun waktu perencanaan 2005-2025 tidak menyerupai fantasi dan obsesi yang kurang membumi.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya data statistik yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJP adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 20 tahun, yang memuat uraian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. RPJP Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025 ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan

oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 2007).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang 2001-2005.

1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJP sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, maka dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan pedoman penyusunan rumusan visi dan misi pasangan calon Kepala Daerah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada). Oleh karena itu, dokumen RPJP ini tidak terlepas dari dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ada sebelumnya seperti Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kabupaten Tulang Bawang, Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tulang Bawang 2001-2005, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, dalam upaya menciptakan sinergisme pembangunan dengan pemerintah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang nasional maka dokumen RPJP ini juga mengacu kepada dokumen RPJP Provinsi Lampung dan RPJP Nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025 ini disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan; yang menguraikan tentang latar belakang perlunya penyusunan RPJP, maksud dan tujuan, landasan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penyusunan.
- Bab II : Kondisi Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang; menguraikan kondisi umum Kabupaten Tulang Bawang saat disusunnya dokumen RPJP dan prediksi kondisi umum pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan.
- Bab III : Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah; menguraikan tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
- Bab IV : Penutup.

II. KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Administrasi Wilayah

Kabupaten Tulang Bawang terletak antara 3°45" - 4°40" Lintang Selatan dan 104°55" - 105°55" Bujur Timur, dan secara fisiografi daerah Tulang Bawang merupakan dataran dengan ketinggian antara 0 - 39 m di atas permukaan laut. Wilayah ini terletak di bagian hilir dari aliran 2 sungai besar yaitu Way Mesuji dan Way Tulang Bawang yang bermuara ke Laut Jawa yang berada di bagian timur wilayah Tulang Bawang. Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Menggala, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Tulang Bawang oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 1997.

Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas wilayah administrasi kabupaten :

Sebelah Utara	:	Provinsi Sumatera Selatan
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Barat	:	Kabupaten Lampung Utara
Sebelah Timur	:	Laut Jawa

Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Tulang Bawang dengan wilayah administrasi seluas 7.770,84 km², hingga saat ini telah memiliki penduduk sebanyak 733.520 jiwa, yang tersebar dalam 23 kecamatan, 6 kelurahan, 231 kamung definit, dan 9 kampung persiapan. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebelum tahun 2005 terdiri dari 16 kecamatan yang meliputi 4 kelurahan, 207 kampung definit dan 9 kampung persiapan dan sejak pertengahan tahun 2005 telah terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 23 kecamatan. Pembagian wilayah kabupaten berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menurut kecamatan.

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Kampung
1.	Tulang Bawang Udik	Karta	20.536	9
2.	Tumijajar	Daya murni	13.211	10
3.	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	26.989	13
4.	Pagar Dewa	Pagar Dewa	13.328	5
5.	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	15.699	14
6.	Banjar Agung	Banjar Agung	33.550	17
7.	Banjar Margo*	Agung Dalam		7
8.	Gedung Aji	Gedung Aji	39.572	23
9.	Penawar Aji*	Gedung Rejo Sakti		11
10.	Menggala	Menggala	67.680	11
11.	Gedung Meneng	Gedung Rahayu	23.467	14
12.	Rawa Jitu Selatan	Media Sari	5.778	10
13.	Rawa Jitu Timur	Bumi Dipasena Mulya	16.800	8
14.	Penawar Tama	Bogatama	47.165	18
15.	Rawa Pitu*	Batang Hari		7
16.	Mesuji	Wira Laga	356.346	22
17.	Mesuji Timur*	Tanjung Mas Makmur		13
18.	Rawa Jitu Utara	Panggung Jaya	18.582	11
19.	Tanjung Raya	Brabasan	16.876	13
20.	Sempang Pematang	Simpang Pematang	14.006	11
21.	Way Serdang	Buko Poso	25.087	11
22.	Gunung Terang	Gunung Terang	22.412	10
23.	Gunung Agung*	Tunas Jaya		
24.	Way Kenanga*	Balam Jaya		

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005

Keterangan (*) : Kecamatan yang baru dibentuk berdasarkan hasil pemekaran kecamatan 2005.

Pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sedang melaksanakan persiapan rencana pemekaran wilayah kabupaten menjadi 3 (tiga) daerah otonom, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (induk), Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji. Jika kebutuhan pemekaran wilayah tersebut disetujui oleh Pemerintah, maka Kabupaten Tulang Bawang hanya akan meliputi 10 wilayah administrasi kecamatan, meliputi Menggala, Gedung Meneng, gedung Aji, Rawa Jitu Selatan, Penawar Tama, Penawar Aji, Rawa Jitu Timur, Rawa Pitu, Banjar Agung, dan Banjar Margo. Selengkapnya rencana pemekaran wilayah kabupaten pasca pemekaran wilayah disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang pasca pemekaran kabupaten Tulang Bawang 2005.

No.	Nama Kabupaten/Kecamatan	Ibukota Kabupaten/Kecamatan	Luas (ha)	Persentase
A.	Tulang Bawang (induk)	Menggala	234.012	30,11
1	Menggala	Menggala	67.680	
2	Banjar Agung	Banjar Agung	33.550	
3	Banjar Margo*	<i>Belum diketahui</i>		
4	Rawa Jitu Selatan	Media Sari	5.778	
5	Penawar Tama	Bogatama	47.165	
6	Penawar Aji*	<i>Belum diketahui</i>		
7	Gedung Meneng	Gedung Rahayu	23.467	
8	Gedung Aji	Gedung Aji	39.572	
9	Rawa Jitu Timur	Bumi Dipasena Mulya	16.800	
10	Rawa Pitu*	<i>Belum diketahui</i>		
B.	Tulang Bawang Barat	Belum ditetapkan	112.175	14,44
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	26.989	
2	Tulang Bawang Udik	Karta	20.536	
3	Gunung Terang	Tunas Jaya	22.412	
4	Gunung Agung*	<i>Belum diketahui</i>		
5	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	15.699	
6	Tumijajar	Daya murni	13.211	
7	Pagar Dewa	Pagar Dewa	13.328	
C.	Mesuji	Belum ditetapkan	430.897	55,45
1	Mesuji	Wira Laga	356.346	
2	Mesuji Timur*	<i>Belum diketahui</i>		
3	Rawa Jitu Utara	Panggung Jaya	18.582	
4	Tanjung Raya	Brabasan	16.876	
5	Sempang Pematang	Simpang Pematang	14.006	
6	Way Serdang	Buko Poso	25.087	

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005

2.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan proyeksi tahun 2004 berjumlah 733.520 jiwa dalam 176.051 rumah tangga yang terdiri dari 385.329 penduduk laki-laki dan 348.191 penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar memeluk agama Islam 702.382 orang, agama Hindu 5.891 orang, agama Protestan 13.777 orang, agama Katolik 6.013 orang, dan agama Budha 1.256.

Persentase struktur umur penduduk sebagian besar berada pada umur produktif (15-64 tahun) dengan jumlah 63,35%, berikutnya usia anak-anak (0-14

tahun) 32,40%, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 4,25%. Pada usia anak-anak, yang termasuk balita sebesar 32,32%. Gambaran kondisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penduduk kabupaten Tulang Bawang tahun 2004 menurut jenis kelamin.

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk			Kepadatan (jiwa/km ²)
			Pria	Wanita	Jumlah	
1.	Tulang Bawang Udik	20.536	14.378	13.844	28.222	137
2.	Tumijajar	13.211	19.037	18.578	37.615	285
3.	Tulang Bawang Tengah	26.989	36.328	33.872	70.200	260
4.	Lambu Kibang	15.699	20.149	18.299	38.448	245
5.	Pagar Dewa	13.328	2.255	2.142	4.397	33
6.	Banjar Agung	33.550	33.921	31.275	65.196	194
7.	Gedung Aji	39.572	20.638	18.764	39.402	100
8.	Menggala	67.680	25.722	23.629	49.351	73
9.	Penawar Tama	47.165	27.919	24.451	52.370	111
10.	Rawa Jitu Selatan	5.778	19.750	10.150	29.900	517
11.	Gedung Meneng	23.467	36.078	31.480	67.558	288
12.	Rawa Jitu Timur	16.800	11.240	16.847	28.087	167
13.	Mesuji	356.346	23.071	20.760	43.831	12
14.	Tanjung Raya	16.876	16.672	14.981	31.653	188
15.	Rawa Jitu Utara	18.582	11.736	10.742	22.478	121
16.	Sempang Pematang	14.006	18.739	16.980	35.719	255
17.	Way Serdang	25.087	18.922	17.035	35.957	143
18.	Gunung Terang	22.412	28.774	24.362	53.136	237
Jumlah		777.084	385.329	348.191	733.520	94

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005.

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang yang tercatat dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Tulang Bawang (2005), rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang adalah 0,925%. Berdasarkan angka pertumbuhan tersebut maka dapat diproyeksikan jumlah penduduk pada akhir tahun perencanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

2.3. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Tulang Bawang atas harga yang bertaku tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut PDRB mengalami peningkatan sebesar 1.677.986 juta rupiah, yaitu tahun

2000 sebesar 2.947.248 juta rupiah menjadi 4.625.234 juta rupiah pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 15,9% per tahun.

Tabel 2.4. Proyeksi penduduk Tulang Bawang 2005 - 2025 (tanpa dan pasca pemekaran wilayah).

Tahun	Tulang Bawang Pasca Pemekaran	Tulang Bawang Tanpa Pemekaran
2004	330.084	733.520
2005	360.617	801.371
2006	371.294	825.098
2007	378.372	840.827
2008	385.451	856.557
2009	392.529	872.287
2010	399.608	888.017
2011	406.686	903.747
2012	413.764	919.476
2013	420.843	935.206
2014	427.921	950.936
2015	435.000	966.666
2016	442.078	982.396
2017	449.156	998.125
2018	456.235	1.013.855
2019	463.313	1.029.585
2020	470.392	1.045.315
2021	477.470	1.061.045
2022	484.549	1.076.775
2023	491.627	1.092.504
2024	498.705	1.108.234
2025	505.784	1.123.964

Sumber : Data Diolah, 2005.

Peningkatan PDRB tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan adanya perbaikan terutama terjadi pada tahun 2002-2004. Sedangkan pada tahun sebelumnya peningkatan terjadi dalam jumlah kecil karena adanya dampak dan krisis moneter yang berkepanjangan. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang menurut harga yang berlaku tertera pada Tabel 2.5.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang ditunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) secara rata-rata mengalami

peningkatan, dan tahun 2001-2004 rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang adalah 3,83%.

Tabel 2.5. PDRB Kabupaten Tulang Bawang tahun 2000-2004 atas dasar harga yang berlaku (dalam jutaan rupiah).

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.394.684	1.526.308	1.629.877	1.800.662	2.014.852
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.398	3.834	4.331	4.820	5.534
3.	Industri Pengolahan Tanpa Migas	628.013	722.225	845.575	926.158	991.259
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.400	2.073	2.395	3.688	3.610
5.	Konstruksi	54.344	72.725	81.839	90.061	92.520
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	554.361	649.816	710.812	794.387	849.148
7.	Transportasi dan Komunikasi	129.684	137.056	224.166	267.180	266.765
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers	77.571	108.360	153.138	178.218	202.696
9.	Jasa-jasa	103.793	120.612	151.333	164.098	198.850
Total PDRB		2.947.248	3.343.009	3.803.466	4.229.272	4.625.234

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005.

Dari Tabel 2.6 terlihat bahwa sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan tanpa migas; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu masing-masing sebesar 3,22%; 4,91%; 5,05%; 17,79%; 3,39%; 2,44%; 6,75%; 11,93%; dan 2,32%.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sektor di atas telah mempengaruhi kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian Tulang Bawang. Berdasarkan harga berlaku kontribusi sektor pertanian masih sangat dominan, sedangkan sektor industri pengolahan tanpa migas menempati peringkat kedua, diikuti dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Demikian halnya jika dilihat

dan harga konstan 2004 nampak kecenderungan yang sama dengan kontribusi sektor menurut harga berlaku.

Tabel 2.6. Pertumbuhan ekonomi per lapangan usaha Kabupaten Tulang Bawang atas dasar harga konstan tahun 2001-2004 (dalam persen).

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	Rata-rata
1.	Pertanian	3,78	0,57	3,58	4,95	3,22
2.	Pertambangan dan Penggalan	4,24	3,87	4,00	7,55	4,91
3.	Industri Pengolahan Tanpa Migas	6,66	4,72	3,69	5,12	5,05
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	28,36	-1,56	16,62	27,73	17,79
5.	Konstruksi	2,16	7,40	3,17	0,84	3,39
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-2,49	3,27	6,31	2,68	2,44
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	-0,40	22,12	11,25	-5,95	6,75
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers	9,68	9,43	13,14	15,47	11,93
9.	Jasa-jasa	4,38	1,44	2,15	1,32	2,32
Total PDRB		3,19	3,29	4,71	4,15	3,83

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang tahun 2004 sebesar 43,55%. Oleh karena itu, dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB akan terus terjadi sampai beberapa tahun ke depan. Namun demikian melihat kepada Tabel 2.7 tersebut juga nampak bahwa sektor industri pengolahan tanpa migas menunjukkan kontribusi yang terbesar kedua setelah pertanian. Oleh karena itu pembangunan sektor industri pada masa yang akan datang merupakan suatu peluang yang cukup baik untuk meningkatkan *performance* PDRB Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2.7. Peranan sektor usaha terhadap perekonomian Kabupaten Tulang Bawang atas dasar harga yang berlaku Tahun 2000-2004 (dalam persen).

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Pertanian	47,32	45,66	42,86	42,58	43,55
2.	Pertambangan dan Penggalan	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12
3.	Industri Pengolahan Tanpa Migas	21,31	21,60	22,23	21,90	21,43
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,05	0,06	0,06	0,09	0,08
5.	Konstruksi	1,84	2,18	2,15	2,13	2,00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,81	19,44	18,69	18,78	18,36
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,40	4,10	5,89	6,32	5,77
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers	2,63	3,24	4,03	4,21	4,39
9.	Jasa-jasa	3,52	3,61	3,98	3,88	4,30
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005.

Proyeksi kondisi perekonomian Tulang Bawang selama periode waktu 2005-2025 dilakukan berdasarkan analisis kondisi perekonomian tahun 2000-2004 menggunakan pendekatan kurva linier terhadap perubahan laju pertumbuhan PDRB. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan (tanpa pemekaran wilayah) mengikuti kurva linier $y = 102.442x + 3.000.000$, $R^2 = 0,99$; besarnya PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku per lima tahun perencanaan disajikan pada Tabel 2.8. Jika terjadi pemekaran wilayah maka diperkirakan total PDRB Kabupaten Tulang Bawang hanya sebesar Rp. 2.813.370 juta rupiah (harga konstan) dan Rp. 6.504.322 juta rupiah (harga berlaku).

Tabel 2.8. Proyeksi PDRB Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025 (tanpa dan pasca pemekaran wilayah) dalam juta rupiah.

Tahun	PDRB (Tanpa Pemekaran)		PDRB (Pasca Pemekaran)	
	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku
2005	3.843.094	5.969.568	1.729.392	2.686.306
2010	4.445.304	8.090.688	2.000.387	3.640.810
2015	5.047.514	10.211.808	2.271.381	4.595.314
2020	5.649.724	12.332.928	2.542.376	5.549.818
2025	6.251.934	14.454.048	2.813.370	6.504.322

Sumber : Data Olah, 2005.

Berdasarkan kondisi proyeksi PDRB tersebut di atas, maka dapat diperkirakan tingkat pendapatan regional per kapita penduduk Tulang Bawang pada tahun perencanaan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun yang sama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Proyeksi pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Tulang Bawang (tanpa dan pasca pemekaran wilayah) Tahun 2005-2025, dalam rupiah.

Tahun	Pendapatan per Kapita (TP)		Pendapatan per Kapita (DP)	
	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku
2005	2.095.985,35	3.255.743,17	4.657.745,21	7.234.984,82
2010	2.213.437,73	4.028.573,54	4.918.750,51	8.952.385,65
2015	2.312.084,00	4.677.660,71	5.137.964,45	10.394.801,57
2020	2.396.106,12	5.230.521,76	5.324.680,28	11.623.381,69
2025	2.468.531,69	5.707.078,09	5.485.625,98	12.682.395,75

Sumber : Data olah, 2005.

Keterangan : TP = tanpa pemekaran wilayah; DP = pasca pemekaran wilayah

2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

a) Sarana Jalan / Transportasi

Jaringan jalan yang berkembang di Kabupaten Tulang Bawang dapat diklasifikasikan pada jalan negara, provinsi dan jalan kabupaten. Jaringan jalan yang ada saat ini telah berfungsi untuk menghubungkan daerah-daerah *hinterland* yang ada di seluruh wilayah Tulang Bawang. Jaringan jalan negara dan provinsi yang ada telah berfungsi untuk memperlancar hubungan transportasi dan Ibukota

Tulang Bawang (Menggala) dengan kabupaten/kota dan provinsi lain yang ada di Sumatera. Jalan Kabupaten berfungsi memperlancar transportasi di lingkup wilayah kabupaten. Panjang jalan berdasarkan kualifikasinya tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Panjang jalan di Kabupaten Tulang Bawang menurut kondisi dan kelas jalan tahun 2004.

Panjang Jalan (km)			
Keadaan	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
Aspal	77,03	228,29	155,93
Kerikil	-	23,90	20,80
Tanah	30,00	72,50	515,87
Onderlaagh	12,20	47,30	275,25

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang 2004.

Jika dibandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2003, nampak bahwa pada tahun 2004 telah ada peningkatan kualitas jalan di Tulang Bawang. Secara total, pada tahun 2004 jumlah panjang jalan negara di Tulang Bawang adalah sepanjang 119,23 km, jalan provinsi 371,99 km, dan jalan kabupaten sepanjang 967,85 km.

Untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang, maka selama tahun 2005-2025 telah direncanakan adanya peningkatan jalan yang sudah ada maupun perintisan jalan-jalan baru, dengan tujuan untuk mengefisienkan sistem transportasi wilayah sekaligus untuk membuka peluang-peluang baru dengan terbukanya hubungan antar bagian wilayah kabupaten. Sistem jaringan jalan yang perlu dikembangkan tersebut meliputi jaringan jalan arteri primer Terbanggi - Bujung Tenuk sepanjang 19,41 km; Bujung Tenuk - Simpang Pematang 61,59 km; dan Simpang Pematang - Pematang Panggang 20,30 km. Jaringan jalan kolektor primer meliputi Menggala - Panaragan - Lampung Utara (20,94 km), Terbanggi - Daya Murni (13,32 km), Panaragan - Daya Murni (15,99 km), Portal - Gedung Rahayu - Bratasena (20,94 km), Simpang Unit IV - Kibang Budi Jaya - Simpang Tunas - Way Kanan (36,96 km), Simpang Unit III - Bukoposo - Tunas Jaya - Simpang Tunas (33,52 km), Simpang Penawar - Bogatama - Rawa Jitu (61,05 km), dan Simpang Gedung Aji -

Gedung Aji - Pasar Batang - Makarti Tama (50,86 km). Adapun jaringan jalan lokal primer meliputi Panaragan - Simpang Tunas (37,49 km), Bukoposo - Pematang Panggang (21,24 km), dan Wiralaga - Rawa Jitu - Teladas - Pasiran Jaya - Lampung Timur (129,14 km). Selengkapnya rencana peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan 2025 disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Rencana peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Tulang Bawang, 2005-2025.

No	Ruas Jalan	Panjang (km)	Fungsi Jalan	Kelas Jalan	Status Jalan
1	Terbanggi - Bujung Tenuk	19,41	Arteri Primer	II	Nasional
2	Bujung Tenuk - Simpang Pematang	61,59	Arteri Primer	I	Nasional
3	Simpang Pematang - Pematang Panjang	20,30	Arteri Primer	I	Nasional
4	Gedung Meneng - Menggala	19,56	Arteri Primer	I	Nasional
5	Menggala - Panaragan - Lampung Utara	20,94	Kolektor Primer	III	Provinsi
6	Terbanggi - Daya Murni	13,32	Kolektor Primer	III	Provinsi
7	Panaragan - Daya Murni	15,99	Kolektor Primer	III	Provinsi
8	Portal - Gedung Rahayu - Bratasena	20,94	Kolektor Primer	-	Provinsi
9	Simpang Unit IV - Kibang Budi Jaya - Simpang Tunas - Way Kanan	36,96	Kolektor Primer	III	Provinsi
10	Simpang Unit III - Bukoposo - Tunas Jaya - Simpang Tunas	33,52	Kolektor Primer	III	Provinsi
11	Simpang Penawar - Bogatama - Rawa Jitu	61,05	Kolektor Primer	II	Provinsi
12	Simpang Pematang - Wiralaga	38,46	Kolektor Primer	II	Provinsi
13	Simpang Gedung Aji - Gedung Aji - Pasar Batang - Maakrti Tama	50,86	Lokal Primer	III	Kabupaten
14	Panaragan - Simpang Tunas	37,49	Lokal Primer	III	Kabupaten
15	Bukoposo - Pematang Panjang	21,24	Lokal Primer	III	Kabupaten
16	Wiralaga - Rawa Jitu - Teladas - Pasiran Jaya - Lampung Timur	129,14	Lokal Primer	III	Provinsi

Sumber : Penajaman RUTRD Kab. Tuba 2003.

b) Sarana dan Prasarana Ekonomi

Sarana pasar telah menyebar pada hampir semua wilayah di Tulang Bawang. Berdasarkan hasil survei Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang (Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, 2005), diketahui terdapat 110 unit pasar dan 8.695 unit kelompok

pertokoan tersebar di seluruh Tulang Bawang. Konsentrasi pasar terbesar terdapat di Kecamatan Way Serdang (18 unit) dan Kecamatan Gunung Terang (16 unit), namun demikian masih banyak dijumpai wilayah kecamatan yang tidak memiliki pasar. Adapun konsentrasi pertokoan terbesar di Kecamatan Simpang Pematang (2.755 unit) dan Gedung Meneng (1.213 unit). Kebanyakan sarana perekonomian di Tulang Bawang saat ini masih merupakan pasar-pasar tradisional, khususnya yang berada di pedesaan, baik yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kabupaten maupun pasar desa yang dikelola desa secara swakelola.

c) Sarana Pendidikan

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan secara merata pada semua wilayah. Sebaran pendidikan pada jenjang sekolah dasar telah mencapai pada tingkat desa di Tulang Bawang. Akan tetapi untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK baik yang berstatus negeri maupun swasta lebih terkonsentrasi pada ibukota kecamatan, sedangkan pendidikan tinggi terpusat pada Ibukota Kabupaten Menggala.

Hingga tahun 2004, di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang telah tersebar 452 SD/MI. Jumlah murid SD pada tahun tersebut sebanyak 113.776 orang, dengan jumlah guru sebanyak 3.075 orang (rasio murid : guru = 37 : 1).

Jumlah SLTP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun yang sama sebanyak 273 sekolah, terdiri dari 108 SLTP/MTs negeri dan 165 SLTP/MTs swasta, dengan jumlah murid 54.056 orang. Sedangkan untuk SLTA/MA banyaknya sekolah 34 terdiri dari 10 SLTA/MA negeri dan 24 SLTA/MA swasta dengan jumlah murid 12.389 orang dan guru 758 orang. Ketersediaan sarana pendidikan formal (sekolah) di setiap kecamatan masih belum merata. Tabel 2.12 menggambarkan distribusi sarana pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2.12. Distribusi sarana pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2004.

No	Kecamatan	Sekolah					
		SD/MI		SLTP/MTs		SMU/MA	
		Neg.	Swas.	Neg.	Swas.	Neg.	Swas.
1	Tulang Bawang Udik	22	-	2	5	1	1
2	Tumijajar	26	-	5	8	1	2
3	Tulang Bawang Tengah	44	5	9	19	2	1
4	Lambu Kibang	27	2	6	8	1	-
5	Pagar Dewa	3	-	-	-	-	-
6	Banjar Agung	39	3	11	19	1	3
7	Gedung Aji	27	-	7	11	-	1
8	Menggala	24	-	7	2	2	2
9	Penawar Tama	34	4	9	16	-	5
10	Rawa Jitu Selatan	19	3	6	11	-	1
11	Gedung Meneng	13	2	7	9	-	-
12	Rawa Jitu Timur	6	-	-	-	-	-
13	Mesuji	14	1	10	15	-	-
14	Tanjung Raya	19	2	5	9	1	2
15	Rawa Jitu Utara	14	2	2	3	-	-
16	Sempang Pematang	22	3	6	5	-	2
17	Way Serdang	25	-	6	9	-	-
18	Gunung Terang	42	5	10	16	1	4
Jumlah		420	32	108	165	10	24

Sumber : Tulang Bawang dalam Angka 2004/2005.

d) Sarana Ibadah

Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang termasuk sangat variatif baik dari suku maupun agama yang dianutnya. Namun demikian mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, sehingga nampak jelas sebaran tempat ibadah seperti masjid dan musholla hampir merata di seluruh wilayah Tulang Bawang. Banyaknya sarana ibadah per kecamatan tertera pada Tabel 2.13.

e) Sarana Kesehatan

Kualitas hidup masyarakat tidak saja ditentukan oleh tingkat pendapatan dan pendidikan yang dicapai oleh masyarakat, tetapi juga kualitas kesehatan masyarakat turut menentukan kualitas hidup masyarakat. Rasio ketersediaan Puskesmas saat ini dengan jumlah penduduk adalah 1: 6.500. Rasio ini belum memenuhi rasio pelayanan prima kesehatan. Sebaran fasilitas kesehatan tertera pada Tabel 2.14.

Tabel 2.13. Banyaknya sarana ibadah per kecamatan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2004.

No	Kecamatan	Masjid	Surau	Gereja	Vihara	Pura	Jumlah
1	Tulang Bawang Udik	105	157	7	2	5	276
2	Tumijajar	74	140	5	-	-	219
3	Tulang Bawang Tengah	97	176	6	-	2	281
4	Lambu Kibang	39	50	7	-	3	99
5	Pagar Dewa	-	-	-	-	-	-
6	Banjar Agung	56	75	13	1	12	157
7	Gedung Aji	23	89	5	-	-	117
8	Menggala	25	55	1	-	1	82
9	Penawar Tama	62	45	3	-	6	116
10	Rawa Jitu Selatan	37	42	3	-	-	82
11	Gedung Meneng	15	25	4	-	2	46
12	Rawa Jitu Timur	-	-	-	-	-	-
13	Mesuji	24	65	4	-	-	93
14	Tanjung Raya	37	102	5	-	3	147
15	Rawa Jitu Utara	22	76	6	3	4	111
16	Sempang Pematang	39	165	2	1	-	207
17	Way Serdang	19	130	6	-	-	155
18	Gunung Terang	61	156	14	2	3	236
Jumlah		735	1.548	91	9	41	2.424

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang, 2004.

Tabel 2.14. Sebaran puskesmas per kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2004.

No	Kecamatan	Jenis Puskesmas				Jumlah
		Perawatan	Induk	Pustu	BP	
1	Tulang Bawang Udik	-	1	5	1	7
2	Tumijajar	1	1	3	1	6
3	Tulang Bawang Tengah	-	2	8	2	12
4	Lambu Kibang	-	1	4	-	5
5	Pagar Dewa	-	-	-	-	-
6	Banjar Agung	1	2	7	1	11
7	Gedung Aji	-	2	5	-	7
8	Menggala	-	2	5	-	7
9	Penawar Tama	-	3	8	-	11
10	Rawa Jitu Selatan	1	1	5	2	9
11	Gedung Meneng	-	2	3	-	5
12	Rawa Jitu Timur	-	-	-	-	-
13	Mesuji	-	3	8	-	11
14	Tanjung Raya	-	1	2	-	3
15	Rawa Jitu Utara	-	1	5	-	6
16	Sempang Pematang	1	1	4	-	6
17	Way Serdang	-	1	3	-	4
18	Gunung Terang	-	2	7	-	9
Jumlah		4	26	82	7	119

Sumber : Tulang Bawang dalam Angka 2004/2005.

f) Sarana Listrik

Kebutuhan listrik masyarakat di Tulang Bawang dilayani oleh PLN Persero (Tbk). Kebutuhan listrik cukup tinggi hal ini terlihat dari besarnya daya terpasang di Tulang Bawang sebesar 14.230 kVA. Apabila kita bandingkan antara jumlah rumah tangga yang ada yaitu 176.051 rumah tangga dan jumlah pelanggan listrik sebesar 27.451 berarti terdapat 148.600 rumah tangga yang belum menikmati pelayanan listrik (84,48%). Jumlah Pelanggan listrik dan jumlah daya terpasang tertera pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Banyaknya pelanggan, kVA terpasang, jaringan dan jumlah gardu listrik per ranting/sub ranting PLN (keadaan Desember 2004).

No	Kecamatan	Pelanggan	kVA Terpasang	Jaringan (KMS)	Jumlah Gardu	Jaringan Tegangan Rendah
1	Tulang Bawang Udik	2.697	1.700	45	19	41
2	Tumijajar	3.845	1.020	35	18	27
3	Tulang Bawang Tengah	9.640	3.700	80	41	101
4	Lambu Kibang	382	460	10	5	11
5	Pagar Dewa	349	300	3	2	7
6	Banjar Agung	6.261	3.750	59	38	109
7	Gedung Aji	-	-	-	-	-
8	Menggala	3.391	2.800	56	24	74
9	Penawar Tama	-	-	-	-	-
10	Rawa Jitu Selatan	-	-	-	-	-
11	Gedung Meneng	-	-	-	-	-
12	Rawa Jitu Timur	-	-	-	-	-
13	Mesuji	389	250	16	5	12
14	Tanjung Raya	-	-	-	-	-
15	Rawa Jitu Utara	-	-	-	-	-
16	Sempang Pematang	497	250	5	4	8
17	Way Serdang	-	-	-	-	-
18	Gunung Terang	-	-	-	-	-
Jumlah		27.451	14.230	309	156	389

Sumber : PLN Tulang Bawang, 2004/2005.

Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025, berarti bahwa kebutuhan akan energi listrik juga akan meningkat. Pada dasarnya nanti semua pemukiman, terlebih-lebih pusat pemukiman, akan membutuhkan daya listrik. Oleh karena adanya keterbatasan kapasitas PLN, maka penyediaan daya listrik pada tahun-tahun mendatang diharapkan tetap melibatkan sumber daya non PLN (swasta) sebagaimana kondisi saat ini. Proyeksi kebutuhan total daya listrik diperhitungkan dengan asumsi (1)

kebutuhan listrik rumah tangga = 90 watt/jiwa; (2) kebutuhan penerangan umum = 10% kebutuhan penduduk; dan (3) kebutuhan industri dan fasilitas umum = 20% kebutuhan penduduk (RUTRD Kab. Tuba, 2003). Rencana kebutuhan listrik tahun 2005-2025 disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Rencana kebutuhan energi listrik 2005-2025 (Watt).

Tahun	Permukiman Penduduk		Penerangan Umum		Industri Dan Fasilitas Umum	
	Pasca Pemekaran	Tanpa Pemekaran	Pasca Pemekaran	Tanpa Pemekaran	Pasca Pemekaran	Tanpa Pemekaran
2005	33.416.449	74.258.776	3.341.645	7.425.878	6.683.290	14.851.755
2010	36.601.737	81.337.193	3.660.174	8.133.719	7.320.347	16.267.439
2015	39.787.024	88.415.610	3.978.702	8.841.561	7.957.405	17.683.122
2020	42.972.312	95.494.027	4.297.231	9.549.403	8.594.462	19.098.805
2025	46.157.600	102.572.443	4.615.760	10.257.244	9.231.520	20.514.489

Sumber : Analisis, 2005.

g) Sarana Air Bersih

Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya mendapatkan manfaat dan pelayanan sarana air bersih. Sarana air bersih terpusat di lingkungan ibukota kabupaten dan beberapa pusat perekonomian. Mayoritas penduduk memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan masak, mencuci dan mandi dari sumur tradisional yang mereka miliki.

h) Sarana Telekomunikasi

Jaringan telepon sebagai sarana telekomunikasi belum dapat menjangkau sebagian besar wilayah Tulang Bawang. Pada umumnya masyarakat Tulang Bawang menggunakan jasa jaringan neon pada wartel-wartel sebagai bantuan tetekomunikasi di daerah. Adapun pengguna jasa Telkom baru terdapat di Kecamatan Menggala dengan jumlah pelanggan 756 KK, Banjar Agung 455 KK, dan Tumijajar 132 KK. Prediksi kebutuhan sambungan telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintah, industri, perdagangan, dan jasa serta perumahan dan layanan sosial diperhitungkan berdasarkan :

- 1 (satu) sambungan untuk pribadi melayani 200 penduduk
- Setiap 20 sambungan telepon pribadi dibutuhkan satu buah sambungan untuk telepon umum

Untuk dua puluh lima tahun ke depan diperkirakan teknologi komunikasi akan sernakin jauh berkembang, terutama sistem nirkabel (wireless). Hal ini membuat perencanaan jaringan kabel menjadi kurang relevan karena membutuhkan investasi yang sangat tinggi serta tidak luwes. Sebagai gantinya akan dapat dijumpai menara-menara telekomunikasi satelit dan reapter di wilayah pemukiman. Dengan demikian rencana sistem telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang sifatnya tidak *fixed*, namun mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi yang sulit diprediksikan.

2.5. Kondisi Budaya dan Adat Istiadat

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang memiliki berbagai ragam latar belakang budaya, kesukuan, dan agama. Hal ini merupakan salah satu potensi besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai kemajuan yang dicita-citakan. Akan tetapi, APABILA hal ini tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi sumber konflik yang kontra-produktif dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

Penduduk daerah ini dapat dikelompokkan dalam masyarakat adat Lampung dan kelompok pendatang. Keberadaan kelompok ini telah membentuk suatu pertalian adat dan budaya yang menjadi suatu akulturasi budaya.

Masyarakat adat Lampung kebanyakan termasuk adat pepadun dengan sebutan marga “Megou Pak Tulang Bawang” (marga empat Tulang Bawang) yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

- Buay Bulan (Kecamatan Menggala, dan Tulang Bawang Udik)
- Buay Suwai Umpu (Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Menggala)
- Buay Tegamo'an (Kecamatan Menggala, Pagar Dewa, Panaragan, Menggala Mas, Bandar Dewa, Penumangan, Banjar Agung, Teladas, Karta, Gedung Ratu, Gunung Katun Malai)
- Buay Aji (Kecamatan Gedung Aji)

Pada lambang kabupaten Tulang Bawang terdapat tulisan “Sai Bumi Nengah Nyapur” yang berarti bahwa masyarakat Tulang Bawang bersifat terbuka dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan serta ramah dalam pergaulan, yang

merupakan perwujudan sikap kemampuan, keluhuran, keyakinan, dan percaya diri yang penuh.

Seiring perkembangan zaman di dalam masyarakat Lampung sudah menjadi akulturasi budaya sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga kini masih terus berjalan. Proses tersebut dipercepat dengan adanya pertukaran/perpindahan penduduk, di mana ada penduduk Lampung pindah ke Jawa baik untuk menuntut ilmu maupun bekerja, dan sebaliknya banyak penduduk Jawa atau daerah lain yang transmigrasi ke Lampung dan khususnya ke Tulang Bawang untuk mendapatkan pekerjaan (mengadu nasib). Kaum transmigran ini tersebar luas di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, salah satu kecamatan yang menjadi tujuan para transmigran dan berbagai etnis/suku adalah Kecamatan Mesuji.

Proses akulturasi budaya mempengaruhi pembentukan pola-pola daerah pemukiman. Perkampungan penduduk asli Lampung masih banyak dijumpai mengikuti jalan, garis pantai, dan aliran sungai dengan pola linier dan pola mengelompok secara sporadis pada wilayah-wilayah pertanian. Sedangkan penduduk pendatang umumnya bermukim pada kantong-kantong pemukiman yang sudah terbentuk dengan dan atau tanpa pengaturan seperti lahan transmigrasi dan pemukiman tradisional/perkampungan.

2.6. Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

2.6.1. Potensi Pertanian

(1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan yang dilaksanakan umumnya menggunakan pola Intensifikasi dan Ekstensifikasi sehingga Kabupaten Tulang Bawang dapat memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya. Produktifitas pertanian tanaman pangan tahun 2004 tertera pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Luas dan produksi tanaman pangan tahun 2004.

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
1	Padi sawah	67.537	344.579,26	5,10
2	Padi ladang	5.322	14.941,28	2,81
3	Jagung	5.131	23.520,75	4,58
4	Ubi kayu	80.727	1.654.449,39	20,49
5	Ubi jalar	169	2.283,28	13,51
6	Kacang tanah	811	1.053,97	1,30
7	Kacang hijau	254	275,79	1,09
8	Kacang kedelai	624	715,00	1,15
9	Sayuran	1.397	9.480,00	6,79
10	Buah-buahan	29.875	815.753,00	27,31

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tulang Bawang.

Tabel 2.18. Luas dan produksi tanaman hortikultura tahun 2004.

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
A. Buah-buahan				
1	Nanas	476	11.477	24,11
2	Sawo	287	4.131	14,39
3	Rambutan	2.150	62.883	29,25
4	Alpukat	107	2.177	20,35
5	Jambu	474	1.552	3,27
6	Durian	19	2.413	127,00
7	Mangga	1.533	15.716	10,25
8	Jeruk	2.791	90.426	32,40
9	Pisang	176	1.640	9,32
10	Duku	6	6	1,00
11	Pepaya	25	232	9,28
B. Sayuran				
1	Ketimun	291	397	1,34
2	Bawang daun	-	-	-
3	Bawang merah	-	-	-
4	Buncis	7	166	23,71
5	Kacang-kacangan	619	848	1,37
6	Kentang	-	-	-
7	Kubis	-	-	-
8	Lobak	-	-	-
9	Terong	467	6.561	14,05
10	Cabe	378	2.120	5,61
11	Tomat	297	2.442	8,22
12	Wortel	-	-	-
13	Bayam	416	4.525	10,88
14	Kangkung	338	4.540	13,43
15	Labu siam	-	-	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tulang Bawang.

(2) Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan di Tulang Bawang sampai tahun 2004 menunjukkan adanya perkembangan yang baik, namun demikian masih diperlukan pembinaan yang intensif agar produktifitasnya dapat semakin meningkat atau dapat mencapai batas produksi yang optimum. Luas lahan dan produktifitas tanaman perkebunan tertera pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Produktifitas tanaman perkebunan rakyat Tulang Bawang 2004.

No	Jenis Komoditas	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
1	Kopi	93,20	50,79	0.54
2	Cengkeh	0,00	0,00	0.00
3	Lada	248,50	25,12	0.10
4	Kelapa dalam	2.339,54	2.483,39	1.06
5	Kelapa hybrida	1.395,50	1.264,60	0.90
6	Karet	32.003,25	77.941,48	2.43

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang.

2.6.2. Potensi Peternakan

Sebagian masyarakat Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun 2004 masih membudidayakan hewan ternak sebagai salah satu mata pencahariannya. Jenis hewan ternak yang dibudidaya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Pada tahun 2004, jumlah hewan ternak sebagaimana tersebut di atas masing-masing sebanyak 52.994 ekor; 4.350 ekor; 126.010 ekor; 1.940 ekor; dan 8.849 ekor dengan jumlah peternak 31.365 orang.

Berdasarkan data statistik tahun 2004 terlihat bahwa perkembangan populasi semua hewan ternak besar dari tahun 2001-2004 menunjukkan angka yang meningkat. Di samping itu, populasi ternak unggas pun menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu meningkat dari tahun 2000-2004, kecuali bebek/itik yang mengalami penurunan pada tahun 2004 dari tahun sebelumnya 2003, yaitu dari 101.411 ekor menjadi 41.647 ekor. Produksi daging, telur dan jenis

hewan ternak di Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada Tabel 2.20 dan Tabel 2.21.

Tabel 2.20. Perkembangan populasi ternak Kabupaten Tulang Bawang, 2004-2004.

No	Tahun	Jenis Ternak							
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Telur	Bebek/ Itik
1	2004	52.994	4.350	126.010	1.940	8.849	697.516	250.000	41.647
2	2003	52.418	4.342	124.017	1.863	8.817	690.964	103.500	101.411
3	2002	50.272	4.312	121.382	1.166	8.728	959.094	108.554	20.121
4	2001	52.365	3.068	110.347	1.076	5.255	755.858	21.659	23.600
5	2000	8.504	2.617	113.994	743	3.724	486.962	26.989	24.140

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005.

Tabel 2.21. Perkembangan produksi hasil ternak (daging dan telur) Kabupaten Tulang Bawang, 2004-2004.

No	Tahun	Telur (kuintal)	Produksi Daging				
			Sapi (kg)	Kerbau (kg)	Kambing (kg)	Babi (kg)	Unggas (kg)
1	2004	7.306	1.169.251	28.350	337.305	80.780	1.531.082
2	2003	7.382	625.275	23.467	186.999	28.026	966.946
3	2002	50.853	136.626	7.778	3.904	13.854	397.700
4	2001	3.834	169.430	24.592	70.866	55.730	343.303
5	2000	804	309.180	24.150	55.230	230.390	tda

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2004/2005.

2.6.3. Potensi Perikanan

Potensi, pemanfaatan dan produksi budidaya kolam yang dilakukan masyarakat pada tahun 2001 merupakan titik kulminasi puncak selama periode tahun 2001-2004, di mana luas area budidaya pada tahun 2004 mencapai 331.918,70 hektar dengan produksi 73.906,30 ton ikan. Pada tahun 2001 luas area budidaya 278.010 hektar menghasilkan 27.530,84 ton ikan. Adapun budidaya ikan mina padi pada tahun 2004 menghasilkan produksi yang cukup

kecil yaitu 1,5 ton ini angka yang cukup kecil jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Lampung.

Di perairan umum, produksi ikan tangkap juga menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, di mana pada tahun 2004 luas areal pemanfaatan berkisar 331.918,70 ha menghasilkan 73.906,30 ton ikan sedangkan pada tahun 2003 dengan luas area tangkap 391.565 ha menghasilkan 62.191,40 ton ikan. Pada tahun 2002 luas area tangkap sebesar 278.010 hektar menghasilkan 27.530,84 ton ikan. Produktifitas ikan tangkap selama periode 2001-2004 relatif meningkat dari tahun ke tahun, hal ini juga didukung dengan ketersediaan sarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh masyarakat Tulang Bawang yang relatif telah memadai seperti kapal motor (261 unit), motor tempel (169 unit), perahu besar (300 unit), perahu sedang (515 unit), perahu kecil (824 unit) dan jukung (360 unit), dengan alat penangkap ikan seperti jaring klitik, jaring insang, bagan, rawal, pancing dan serok.

Tabel 2.22. Luas areal pemeliharaan/penangkapan dan produksi ikan di Kab. Tulang Bawang.

No	Sumber	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	Laut		
	Pantai timur	136.200,00	9.533,70
2.	Darat		
	Waduk	53,00	202,50
	Rawa	100.000,00	3.007,83
	Sungai	4.500,00	1.017,23
	Kolam (empang)	20.000,00	40,80
	Tambak	11.319,50	8.734,40
	Cekdam (air lainnya)	257,00	862,26
	Mina padi (sawah)	0,00	1,50

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang.

2.6.4. Potensi Kehutanan

Kabupaten Tulang Bawang merupakan suatu daerah yang mempunyai wilayah hutan yang cukup luas. Oleh sebab itu pembangunan kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Berdasarkan peta penggunaan lahan (Bakosurtanal, 2003), sumberdaya hutan Kabupaten Tulang Bawang meliputi hutan lebat kering dan hutan lebat

basah. Keseluruhan luas areal hutan mencapai 113.541,8 ha yang terdiri dari 70.744,67 ha hutan lebat lahan basah dan 42.797,16 ha hutan lahan kering. Luas areal hutan ini hanya merupakan bagian kecil dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang yaitu sekitar 14,61%.

Lokasi hutan lebat lahan basah tersebar di 11 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yaitu Kecamatan Gedung Meneng, Tanjung Raya, Gedung Aji, Menggala, Mesuji, Rawa Jitu Utara, Rawa Jitu Selatan, Penawar Tama, Banjar Agung dan Simpang Pematang. Luasan hutan lebat basah sangat bervariasi dari yang hanya merupakan spot-spot sampai pada berupa areal lahan yang sangat luas. Hutan lebat lahan basah terluas berada dalam lingkup 3 wilayah administrasi yaitu Kecamatan Gedung Meneng, Rawa Jitu Selatan dan Penawar Tama dengan luas areal 28.085,26 ha atau sekitar 39,70% dari total luas hutan lebat basah.

Berbeda dengan hutan lahan basah, hutan lebat lahan kering terbagi dalam dua luasan yang utama yaitu hutan lahan kering dengan luas 15.799,47 ha dan hutan lahan kering dengan luas 24.185,76 ha. Areal hutan dengan luas 15.799,47 ha termasuk dalam lingkup 3 wilayah administrasi yaitu Kecamatan Way Serdang, Simpang Pematang, dan Mesuji Lampung. Areal hutan ini berimpit dengan kawasan hutan Register 45 yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Areal hutan dengan luas areal 24.085,76 ha termasuk dalam 4 wilayah administrasi yaitu Kecamatan Mesuji Lampung, Penawar Tama, Rawa Jitu Utara dan Selatan. Di dalam areal hutan ini terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan luas areal 7.486,177 ha. Di samping itu masih terdapat hutan lahan kering dengan luas areal 2.335,619 ha dan 1.151,58 ha yang keduanya berlokasi di Kecamatan Gedung Meneng.

2.6.5. Potensi Industri

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai jenis industri terutama industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri), hal ini karena telah banyak berkembang usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang dapat menyuplai bahan baku bagi agroindustri.

Sedangkan industri kecil telah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang sampai tahun 2004 mencapai 102.600 unit usaha dengan sebaran industri logam, mesin dan kimia 16.000 dengan jumlah tenaga kerja 48 orang, industri hasil pertanian dan kehutanan 86.400 unit dengan jumlah tenaga kerja 1.728 orang dan aneka industri lainnya sebanyak 200 unit dengan tenaga kerja 53 orang.

2.6.6. Potensi Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, meliputi wisata alam Bawang Lambu, Bawang Latak, Pulau Daging, Daerah Jembatan Cakat (jembatan terpanjang di Lampung), jembatan Bujung Tenuk. Untuk mengembangkan potensi wisata tersebut perlu ditunjang sarana dan prasarana, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.6.7. Potensi Lahan

a) Kondisi Hidrologis

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang secara hidrologis merupakan daerah dataran sampai dengan bergelombang yang dialiri oleh banyak sungai. Sungai-sungai besar tersebut diantaranya adalah :

- Way Mesuji dan anak-anak sungainya mengalir di bagian utara wilayah kabupaten dan sekaligus sebagai batas administrasi dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Anak sungai Way Mesuji yang besar adalah Way Buaya. DAS Way Mesuji mempunyai luas 2.053 km² dengan panjang aliran mencapai 220 km.
- Way Tulang Bawang dan anak-anak sungainya mengalir di bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Anak sungainya yang besar diantaranya adalah Way Pedada, Way Kanan dan Way Kiri. DAS Way Tulang Bawang mempunyai luas 1.285 km² dengan panjang aliran mencapai 136 km.
- Way Seputih mengalir di sebelah selatan wilayah Kabupaten dan sekaligus sebagai batas administrasi bagian selatan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Kondisi hidrologis di atas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Tulang Bawang berpotensi dalam pengembangan sumberdaya air, baik untuk pertanian, transportasi, budidaya perairan sungai maupun pelabuhan.

Sebagian besar tanah di Kabupaten Tulang Bawang, terdiri dari lima jenis tanah utama, yaitu alluvial, regosol, podzolik coklat, latosol dan podsolik merah kuning.

Pada wilayah dataran rendah sebagian cekungan, merupakan dataran banjir dengan dominasi tanah alluvial, terutama asosiasi alluvial glei humus, alluvial hidromorf dan endapan enkustrin. Kadangkala dari endapan sungai seperti di sekitar Menggala bagian atas dite mukan tanah alluvial kelabu, dimana tanah-tanah ini setara dengan jenis tanah tropaguents, tropopsammments dan hydraguents.

b) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Tulang Bawang untuk padi sawah seluas 2.233,61 ha, perkebunan seluas 1.776,89 ha, dan tanaman pangan, sayuran buah-buahan dan peternakan 1.788,61 ha. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah agraris. Pada masa yang akan datang akan terjadi pergeseran pola penggunaan lahan karena adanya perubahan orientasi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Rincian luas wilayah menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23. Distribusi dan luas kesesuaian lahan Kabupaten Tulang Bawang.

No	Kecamatan	Kesesuaian Lahan							Jumlah (km ²)
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Menggala	263,53	53,96	30,81	204,81	61,51	52,78		403,873
2	Gd. Meneng	263,71	404,22	5,12	1,84	860,27			1.534,993
3	Rawa Jitu Sel.	6,77	184,73		19,95				468,384
4	Penawar Tama		287,03	77,19	124,69				495,676
5	TB. Udik		34,50	182,50	16,42				233,417
6	Tumijajar			128,55					128,546
7	TB. Tengah		55,09	231,61	97,05				383,752
8	Lambu Kibang		15,18	115,62	142,10				272,906
9	Banjar Agung		53,06	255,36	127,30				435,726
10	Gedung. Aji		179,70	203,84	1,76	6,47			391,767
11	Gunung Terang		63,25	211,73	142,35				417,328
12	Sp. Pematang		41,10	53,63	162,27			7,70	264,712
13	Way Serdang		30,64	44,59	177,87			34,57	287,675
14	Mesuji		523,65	139,24	294,88			379,98	1.337,752
15	Tanjung Raya		149,19	89,68	202,88			4,07	445,826
16	Rawa Jitu Utara	30,66	157,98	19,15	60,72				268,503
Jumlah		654,66	2.233,31	1.788,61	1.776,89	928,26	52,78	426,33	7.770,840

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka 2002.

Keterangan : (1). Perikanan; (2). Padi sawah; (3). Tanaman pangan, sayuran, buah dan peternakan; (4). Buah-buahan dan perkebunan; (5). Tebu; (6). Hankan; (7). HTI.

Kondisi sebagaimana tertera dalam Tabel 2.23 tersebut di atas pada masa yang akan datang tentunya akan mengalami perubahan, karena beberapa lahan

telah mengalami perubahan fungsi yang tadinya merupakan lahan sawah berubah menjadi tambak. Lahan kebun/tegalan/huma tentunya akan mengalami perubahan menjadi lahan pemukiman, mengingat pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan adanya jalan-jalan tembus yang memungkinkan terjadinya peningkatan arus perpindahan penduduk dan suatu daerah ke daerah lain.

2.7. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

(1) Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2003 adalah sebesar 476.616 jiwa dan pada tahun 2004 mencapai 498.934 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,47%. Proporsi penduduk usia kerja terhadap total penduduk Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari 65,97% pada tahun 2003 menjadi 68,01% pada tahun 2004. Adapun jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari 331.287 pada tahun 1997 menjadi 162.440 jiwa pada tahun 2004. Proporsi angkatan kerja terhadap total penduduk Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan dari 47,16% pada tahun 1997 menjadi 22,17% pada tahun 2004. Keterlibatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang dalam angkatan kerja pada tahun 1997 sebesar 43,24% sedangkan pada tahun 2004 angka keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja hanya mencapai 22,46%.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan dari 323.815 jiwa pada tahun 1997 menjadi 162.440 jiwa pada tahun 2004. Namun demikian pada tahun 1997 jumlah angkatan kerja yang tidak/belum bekerja di Kabupaten Tulang Bawang diketahui sebanyak 18.372 jiwa dan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2004 hingga mencapai 46,48% dari total angkatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang.

Tingkat serapan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 1997 hingga 2004 secara umum didominasi oleh sektor pertanian sebesar 77,42%. Sektor perekonomian yang juga cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan sebesar 10,47%. Namun karena krisis ekonomi pada tahun 1997, sektor industri sulit berkembang sehingga hanya sedikit memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan dampaknya masih terasa hingga tahun 2004. Penurunan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa dan

meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan indikasi adanya peralihan tenaga kerja dari sektor industri dan jasa ke sektor pertanian. Dengan kata lain perkembangan kondisi perekonomian pada tahun 2003 dan 2004 menyebabkan sektor pertanian menjadi lebih menarik bagi tenaga kerja untuk masuk dan bekerja di sektor tersebut, atau sebaliknya bahwa kondisi yang ada menyebabkan tenaga kerja terpaksa beralih jenis pekerjaannya dari sektor industri dan jasa ke sektor pertanian yang diakibatkan lesunya pertumbuhan di sektor industri dan jasa.

(2) Kesejahteraan Sosial

Indikator kesejahteraan ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang bersifat makro dari BPS atau angka kesejahteraan keluarga menurut BKKBN. Angka kemiskinan secara mikro di Daerah Kabupaten Tulang Bawang menurut BPS sangat terbatas sekali. Menurut BPS, angka kemiskinan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2001 sebesar 31,25%. Pada tahun 2001 laju pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 4,09%, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk miskin pada periode tahun 1996-1999 sebesar 5,96%, sehingga laju pertumbuhan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk Kabupaten Tulang Bawang menjadi -3,76% pada tahun 2001.

Pada tahun 2002 jumlah KPS-AE di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 92.388 KK dan terjadi penurunan pada tahun 2001 menjadi 87.584 KK. Secara proporsional laju pertumbuhan KPS-AE pada tahun 2001 tersebut lebih banyak disebabkan karena meningkatnya status mereka kepada kelompok KPS-NAE.

Perkembangan pembangunan meningkatkan jumlah KPS-NAE, KSI-AE, KSI-NAE. Pada tahun 2000 KPS-NAE terdapat 17.594 KK meningkat menjadi 24.771 KK pada tahun 2001, 28.244 KK pada tahun 2000 menjadi 32.050 KK pada tahun 2001 untuk KSI-AE, 13.122 KK pada tahun 2000 menjadi 22.204 KK pada tahun 2001 untuk KSI-NAE. Perkembangan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2000-2003 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Berdasarkan data tahun 2003, diketahui masih terdapat 21 desa/kampung tergolong miskin (sedang berkembang) dan 81 desa/kampung terentaskan (maju).

Dominasi desa/kampung miskin terbesar berada di Kecamatan Lambu Kibang sebanyak 5 desa/kampung, diikuti Kecamatan Tulang Bawang Udik, Gedung Meneng, dan Rawa Jitu Utara masing-masing sebanyak 3 desa/kampung.

Tabel 2.24. Jumlah KK, KPS-AE, KPS-NAE, KSI-AE, KSI-NAE Kabupaten Tulang Bawang.

No	Keterangan	1997	1998	1999	2000	2001
1	Jumlah KK	0	148.710	165.004	175.645	180.369
2	KPS-AE % terhadap KK	0 0	72.498 48,75	89.431 54,20	92.388 52,60	87.584 48,56
3	KPS-NAE % terhadap KK	0 0	18.410 12,38	18.152 11,00	17.594 10,02	24.771 13,73
4	KSI-AE % terhadap KK	0 0	25.512 17,16	23.211 14,07	28.244 16,08	32.050 17,77
5	KSI-NAE % terhadap KK	0 0	18.787 12,63	11.221 6,80	13.122 7,47	22.204 12,31

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2002.

(3) Kesehatan Masyarakat

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun 2004, telah memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap tingkat kesehatan lingkungan dan masyarakat Tulang Bawang. Dengan dukungan 400 unit posyandu, 119 unit puskesmas dan dukungan 349 tenaga medis, telah mampu melayani 176.703 kasus penderita rawat jalan dan menangani jenis penyakit yang sering diderita masyarakat seperti infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas sekaligus sebagai jenis penyakit yang paling sering diderita (24,91%), penyakit sistem otot dan jaringan pengikat (8,42%), diare (6,16%), penyakit darah tinggi (5,40%), kulit infeksi (8,09%), infeksi penyakit usus (3,98%), malaria klinis (3,91%), penyakit kulit alergi (3,83%), asma (3,17%), dan penyakit lainnya (9,17%).

Di samping itu, program imunisasi bayi dan ibu hamil selama tahun 2004 telah memberikan pelayanan kepada 17.571 bayi dengan BCG, 17.200 DPT I, 17.035 Folio-3, 16.901 campak, 9.258 bumil dengan TT 1 dan 6.382 bumil dengan TT 2.

(4) Pendapatan Per Kapita Masyarakat

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dan besar kecilnya pendapatan perkapita penduduk.

Nilai pendapatan perkapita penduduk suatu daerah diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang biasa disebut PDRB perkapita. Sedangkan nilai pendapatan regional perkapita suatu daerah diperoleh dengan cara menghilangkan terlebih dahulu pengaruh penyusutan dan pajak tidak langsung terhadap nilai PDRB kemudian membagi nilai tersebut dengan penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Tulang Bawang mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Pada tahun 2000 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Tulang Bawang mencapai Rp. 4.260.125, kemudian tahun 2001 menjadi Rp. 4.760.446 atau mengalami kenaikan sebesar 11,74%; pada tahun 2002 menjadi 5.336.917 naik sebesar 12,11%; pada tahun 2003 mencapai Rp. 5.848.839 atau naik sebesar 9,59%; dan pada tahun 2004 menjadi Rp. 6.305.532 atau naik sebesar 7,81%.

Nilai PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25. PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita Kabupaten Tulang Bawang tahun 2000-2004 atas dasar harga berlaku.

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total PDRB (juta rupiah)	PDRB Perkapita (Rp)	Pendapatan Regional Perkapita (Rp)
2000	691.822	2.947.248	4.260.125	3.801.797
2001	702.247	3.343.009	4.760.446	4.203.299
2002	712.671	3.803.466	5.336.917	4.677.024
2003	723.096	4.229.272	5.848.839	5.133.231
2004	733.520	4.625.234	6.305.532	5.565.075

Sumber : PDRB Kabupaten Tulang Bawang 2004/2005.

Pada tahun 2002, nilai nominal PDRB Kabupaten Tulang Bawang atas dasar harga konstan tahun 1993 tanpa migas mengalami peningkatan dari Rp. 2.947.248 juta pada tahun 2000 menjadi Rp. 3.141.101 juta pada tahun 2002 dan

angka sementara dari BPS, nilai nominal PDRB Tulang Bawang pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.425.543 juta. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Tulang Bawang tanpa migas menunjukkan bahwa pada tahun 2000 sebesar Rp. 2.947.248 juta dan meningkat terus-menerus hingga mencapai Rp. 4.229.272 juta pada tahun 2003. Pada tahun 2004 berdasarkan angka sementara menunjukkan adanya peningkatan nilai PDRB Kabupaten Tulang Bawang menjadi Rp. 4.625.234 juta.

2.8. Pemerintah Daerah

Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2004 terbagi dalam 18 kecamatan, 239 desa dengan 238 desa definitif dan 1 desa persiapan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang melibatkan 6.002 orang pegawai negeri sipil (PNS) Pemda Kabupaten Tulang Bawang dengan berbagai jenjang pendidikan dan tingkat kepangkatan.

Berdasarkan tingkat kepangkatan PNS Pemda Tulang Bawang didominasi oleh staf berpangkat IV sebanyak 518 orang, berpangkat III sebanyak 3.574 orang, kemudian berpangkat II sebanyak 1.794 orang, dan berpangkat I sebanyak 116 orang.

Pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang juga diawasi oleh wakil-wakil rakyat melalui DPRD. Pada tahun 2004, sebagian besar anggota DPRD berasal dari Fraksi Golongan Karya (Golkar). DPRD Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas beberapa komisi, yaitu Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Pembangunan), dan Komisi D (Bidang Kesejahteraan Masyarakat). Jumlah anggota DPRD secara keseluruhan adalah 45 orang, yang berasal dari Partai Golkar 11 orang, PDIP 12 orang, PKB 5 orang, PKPB 5 orang, Partai Bersatu 5 orang.

III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi Kabupaten Tulang Bawang 2025

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TULANG BAWANG YANG AMAN, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN”.

3.2. Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025

Untuk mencapai visi tersebut, dilaksanakan dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2025 secara bertahap yang terdiri dari :

- a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya, hukum, dan berkehidupan berpolitik demokratis.
- b. Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- c. Mendayagunakan segenap potensi ekonomi daerah berlandaskan hukum.
- d. Melaksanakan manajemen pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan *accountable*.
- e. Melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis masyarakat dan berkeadilan.

Visi dan Misi pada Renstra Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 sangat relevan untuk dipakai dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tulang Bawang, tetapi dengan melakukan penyesuaian yang positif terhadap isu aktual yang berkembang di daerah pada tahun 2005 dan perkiraan permasalahan pokok pembangunan selama tahun 2005-2025. Selain itu, perkembangan permasalahan dan realisasi pembangunan Tahun Anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 juga menjadi acuan.

3.3. Arah Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Tulang Bawang yang maju dan mandiri dalam kondisi

lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Tulang Bawang yang maju, mandiri dalam kondisi lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera, maka pembangunan daerah Tulang Bawang dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

A. Menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sosial budaya, hukum dan kehidupan berpolitik yang demokratis, ditunjukkan oleh :

1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat, serta memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa.
3. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.
4. Terwujudnya konsolidasi demokratis pada berbagai aspek kehidupan berpolitik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

B. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, ditunjukkan oleh :

1. Kualitas SDM yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya **IPM** dan **IPG**, serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2006 mencapai sekitar **Rp 12.682.395,-** dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari lima persen.

C. Mendayagunakan segenap potensi ekonomi daerah berlandaskan hukum, ditunjukkan oleh :

1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif di berbagai wilayah Tulang Bawang. Sektor pertanian dalam arti luas dan menjadi basis aktifitas ekonomi yang dikelola secara efisien menghasilkan komoditas berkualitas, dan agroindustri yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta perdagangan dan jasa yang peranannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, selaras, seimbang, dan lestari.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

D. Terwujudnya pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntable, ditunjukkan oleh :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional (***Clean Governance and Good Government***), yang mampu mendukung pembangunan nasional.

2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana yang terarah dalam pembangunan daerah.

E. Melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis masyarakat dan berkeadilan, ditunjukkan oleh :

1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air.
2. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa pemukiman kumuh.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kemandirian serta berkeadilan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

A. Menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sosial budaya, hukum dan kehidupan berpolitik yang demokratis, dilakukan melalui :

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.

2. Pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat Tulang Bawang ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berbudaya, modern dan unggul. Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jatidiri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jatidiri dan kebanggaan, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
3. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum daerah (Perda), dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakkan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.
4. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada proses pengalokasian/ representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan :
 - Meningkatkan secara terus-menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik.
 - Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap masyarakat berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

5. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui :
 - Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media.
 - Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan.
6. Penerapan dan penegakkan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas yang mantap dan dinamis.
7. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses yang luas terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat, memberikan akses tinggi kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga serta terbentuk perilaku yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
8. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah dicapai dengan :
 - Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.
 - Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

B. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, ditujukan untuk menjadikan masyarakat Tulang Bawang siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat SDM dan daya saing bangsa, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1 (satu), atau angka fertilitas total (FFR) sama dengan 2,1 (dua koma satu), melalui :

1. Pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas manusia sehingga mampu berdaya saing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan bermasyarakat dan tanpa deskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih merata dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah yang didukung dengan sistem administrasi kependudukan yang handal.
3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta pada upaya promotif dan preventif.

4. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
5. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

C. Mendayagunakan segenap potensi ekonomi daerah berlandaskan hukum, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan rakyat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
2. Mengembangkan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat; meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi.
3. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri (agroindustri) sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pesisir dan pantai, dan jasa-jasa pelayanan yang efektif.

4. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik.
5. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien.
6. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan.
7. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Tulang Bawang sebagai daerah tujuan wisata.
8. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak.
9. Mendayagunakan SDA yang terbarukan (renewable) harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, bertanggung jawab dan seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya. Hasil atau pendapatan yang berasal dan pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
10. Pengelolaan SDA tidak terbarukan (unrenewable) diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlukan input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal.
11. Menjaga dan melestarikan sumberdaya air. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
12. Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan

pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

13. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi. Secara geografis Indonesia dan termasuk Tulang Bawang berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Di samping itu, Kabupaten Tulang Bawang dengan sungai-sungai besar di dalamnya mengandung potensi bencana alam banjir. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi, dan diseminasi informasi secara dini kepada masyarakat terhadap ancaman kerawanan bencana alam.
14. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
15. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup.

D. Terwujudnya pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, diarahkan untuk meningkatkan peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, melalui perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah maka sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi terus ditingkatkan efektifitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

E. Melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis masyarakat dan berkeadilan, dilakukan melalui :

1. Pembangunan jaringan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa serta menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
2. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan dan perluasan layanan elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan sesuai kebutuhan.
3. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
4. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan.
5. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
6. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja.

7. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
8. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan daerah dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM bidang kesejahteraan sosial.
9. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau daya beli masyarakat.

3.4. Arah Pembangunan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Berdasarkan kondisi fisik yang ada, potensi, serta misinya terhadap wilayah yang lebih luas, dapat dikemukakan skenario umum pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

- Sisi barat diarahkan untuk konservasi dan resapan air dengan pengembangan tanaman keras berupa perkebunan karet dan hutan produksi.
- Bagian tengah diperuntukkan bagi budidaya perkebunan kelapa sawit skala besar, baik diusahakan oleh masyarakat maupun investor (tradisional dan intensif).
- Sisi timur direkomendasikan untuk konservasi, budidaya pertambakan dan pertanian lahan sawah.

Dengan pemikiran tersebut, dalam kerangka kawasan, wilayah Kabupaten Tulang Bawang dapat dipilahkan atas ruang-ruang yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai berikut :

Kawasan Lindung

Kawasan lindung bagi wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalah bagian wilayah yang dialokasikan untuk fungsi perlindungan bagi kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan

bencana, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, RTRWN, serta juga memperhatikan kondisi setempat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Tabel 3.1 memberikan gambaran ringkas alokasi ruang bagi kawasan lindung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 3.1. Alokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan	Alokasi (ha)	Lokasi
Lindung Daerah Bawahan • Kawasan Resapan Air	107.255	Kecamatan-kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Gedung Meneng
Lindung Setempat • Kawasan Sempadan Sungai • Kawasan Sempadan Pantai • Kawasan Sabuk Hijau Waduk, Embung dan sekitar Rawa	28.498	100 m di kanan-kiri Way Terusan-Seputih, Way Tulang Bawang, Way Pedada, Way Mesuji, Way Buaya 50 m di kanan-kiri sungai-sungai lainnya. Minimal 100 m dari garis pasang tertinggi sepanjang pantai Kecamatan-kecamatan Rawa Jitu Selatan (Dipasena) dan Gedung Meneng (Bratasena0 50-100 m di sekitar badan air yang bersangkutan di Kecamatan-kecamatan Mesuji, Simpang Pematang, Gunung Terang, Menggala, Way Serdang, Penawar Tama, Gedung Meneng.
Suaka Alam & Cagar Budaya • Kawasan Suaka Alam (Habitat Rawa & Hutan Bakau)	22.272	Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Menggala (Rawa Pacing), dan bantaran Way Seputih serta hutan bakau di sepanjang pantai Rawa Bujung Tenuk, Rawa Pacing, kota Menggala/Ujung Gunung, Kec. Menggala dan Pagar dewa, Kec. Tulang Bawang Tengah
Lindung Rawan Banjir • Kawasan Bahaya Banjir	600.182	Area limpasan air permukaan di daerah Bujung Tenuk Kecamatan Menggala, sekitar rawa, sepanjang sungai
Budidaya • Pertanian • Bukan Pertanian	18.777	Semua kecamatan Semua kecamatan

Sumber : Penajaman RUTRD Kabupaten Tulang Bawang, 2003.

Hanya saja daerah tangkapan air bagi sistem tata air Kabupaten Tulang Bawang justru banyak terdapat di luar wilayahnya, yakni daerah Kabupaten Lampung Utara maupun Way Kanan. Dengan demikian ketentuan pemanfaatan ruangnya diatur dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Bahkan per definisi, kawasan lindung bawahan dengan kriteria ketinggian 1000 m dari permukaan laut, kelerengan 40%, dan curah hujan tinggi, tidak terdapat di wilayah kabupaten. Namun secara relatif “daerah-daerah atas” di dalam wilayah kabupaten harus diberikan perhatian sebagaimana kawasan lindung bawahan karena fungsinya sebagai daerah penambat/tangkapan air. Oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh kabupaten sendiri adalah semaksimal mungkin menjaga daerah resapan yang berada di dalam wilayahnya sendiri.

Kawasan yang mampu berfungsi sebagai resapan air terletak di sisi barat kabupaten yakni wilayah kecamatan-kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Gunung Terang, Lambu Kibang, Way Serdang, maupun juga Gedung Meneng, yang mencakup areal seluas 107.255 ha. Hanya saja pada umumnya area ini telah dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, baik sebagai hutan produksi, perkebunan, bahkan dibuka sebagai pertanian lahan kering (tegalan) sehingga kehilangan kemampuan menambat air.

Selain itu wilayah Kabupaten Tulang Bawang juga dicirikan dengan banyaknya rawa-rawa serta hutan lebat basah. Bentuk lahan semacam ini terutama terletak pada daerah-daerah yang lebih rendah. Sekalipun lahan ini tidak dapat bertindak sebagai pengisi air tanah bagi wilayah kabupaten keseluruhan yang lebih tinggi, namun keberadaannya tetap berfungsi sebagai pemelihara tata air area di bawahnya, yakni daerah pesisir dan pantai. Simpanan cadangan airnya membantu menjaga keseimbangan tata air dengan mencegah intrusi air laut kearah daratan.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun 0-5% bagi pertanian dan perkebunan; serta 5-25% bagi kawasan permukiman perdesaan.
2. Pengendalian kepadatan bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0-15% bagi daerah pertanian dan perkebunan; serta 15-30% bagi kawasan permukiman perdesaan.

3. Pengembangan irigasi bagi pertanian sawah tadah hujan dan tegalan.
4. Pengembangan sistem konservasi air berupa telaga maupun embung bagi daerah perkebunan.
5. Pengembangan sumur-sumur resapan air hujan (*water injection*) dan embung pada kawasan permukiman.
6. Pengembangan sistem konservasi tanah secara civil teknis seperti penyempurnaan teras, pembuatan dam pengendali, dam penahan, perlindungan jurang kecil, dan konservasi tanah secara vegetatif (penghijauan, penanaman penutup tanah, pertanaman lorong, dan lainnya) terutama pada daerah tangkapan air.
7. Pengembangan tanaman keras cepat tumbuh dengan luas penutup tajuk minimal 50% bagi hutan rakyat.
8. Pengembangan tanaman penutup tanah dan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif bagi perkebunan.

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas air setempat, serta mempertahankan kelestarian fungsi sungai, pantai, embung dan telaga ataupun rawa. Kawasan perlindungan setempat meliputi :

a) Sempadan Sungai

Tergantung pada bentuk dan kondisi fisik alur sungai, sempadan sungai dan saluran air sekurang-kurangnya sebesar 100 m di kanan-kiri sungai besar, 50 m di kanan-kiri anak sungai yang berada di permukiman, dan 10-15 m di kanan-kiri sungai yang melintas di kawasan permukiman.

Kawasan sempadan sungai mencakup sungai-sungai besar yang bermuara langsung ke Laut Jawa, yakni Way Mesuji, Way Tulang Bawang, dan Way Seputih/Terusan; sungai sedang yang bermuara pada Way Mesuji (Way Buaya), Way Tulang Bawang (Way Pidada, Way Kiri, Way Kanan), Way Terusan (sungai-sungai kecil), serta anak cabang sungai-sungai lainnya.

Adapun kawasan sempadan pada saluran irigasi dan kanal mencakup seluruh saluran irigasi induk/primer di wilayah kerja pengairan pertanian Way Rarem (Daya Murni dan Pulung Kencana), Way Simpang Pematang (Rawa

Mesuji-Tulang Bawang), Rawa Pidada-Tulang Bawang (Rawapitu), serta Rawa Mesuji Atas.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Menetapkan sempadan sungai dan saluran sesuai dengan Keppres 32/1990, yaitu sekurang-kurangnya 100 m di kiri-kanan sungai besar dan 50 m di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman, serta 10-15 m di kiri-kanan sungai di kawasan permukiman.
2. Membebaskan sempadan sungai dan saluran dan kegiatan budidaya dan permukiman yang dapat merugikan fungsi lindungnya.
3. Mengembangkan ruang terbuka hijau khususnya pada sekitar sungai di perkotaan, dan mengembangkan jalur hijau di sepanjang aliran sungai yang berfungsi sebagai penahan erosi dan relung ekologi bagi kehidupan satwa.

b) Kawasan Sempadan Pantai

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai garis pantai sepanjang sekitar 60 km yang berada di wilayah Rawa Jitu Selatan (Dipasena) dan Gedung Meneng (Bratasena). Pada daerah ini ditetapkan kawasan sempadan pantai dengan luas sekitar 600 ha, yang mencakup area selebar minimal 100 meter dari garis pantai saat pasang tertinggi ke arah daratan. Namun mengingat perwujudan pantai pada dasarnya berupa hutan bakau, maka kriteria kawasan pantai berhutan bakau pun berlaku di sini. Ekosistem hutan bakau mempunyai arti penting ganda, yakni sebagai relung habitat bagi biota laut, serta pelindung pantai dan usaha budidaya pertambakan di belakangnya dan hempasan dan pengikisan air laut.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Menerapkan sempadan pantai sesuai dengan Keppres 32/1990, yaitu sekurang-kurangnya hingga berjarak 100 m dan garis pantai ke arah daratan.
2. Membebaskan sempadan pantai dari kegiatan budidaya dan permukiman yang dapat merugikan fungsi lindungnya, misalnya pertambakan intensif maupun pertambakan rakyat, tidak dibangun langsung berbatasan dengan bibir pantai namun di belakang sempadan yang ditetapkan.

3. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove/bakau untuk menjaga pantai dan kerusakan akibat erosi, menahan intrusi air laut, serta penyediaan habitat alami bagi satwa pantai.

c) Kawasan Sekitar Waduk, Embung dan Rawa

Kawasan sekitar waduk, embung dan rawa mencakup area sekitar waduk-waduk Wirabuana dan Brabasan (Mesuji), embung-embung Way Siwa dan Way Sidoarjo (Menggala), Way Bening, Supit dan Wirabangun (Simpang Pematang), Way Darsiyem (Mesuji), Way Tujang (Gunung Terang), Lambu Kibang, Bujuk Tenung dan sejumlah badan air lainnya. Kawasan sekitar badan air ini ditetapkan sebagai daerah sempadan. Delineasi keruangannya diambil secara proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisiknya, atau sekitar 50 sampai 100 meter dan titik pasang tertinggi ke arah darat.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Menetapkan kawasan sekitar waduk, embung dan rawa sebagai kawasan lindung, yaitu meliputi daratan sepanjang tepian air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50-100 meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat.
2. Membebaskan kawasan sekitar waduk, embung dan rawa dan kegiatan permukiman dan budidaya pertanian yang mengancam kelestarian fungsi lindungnya, kecuali untuk tanaman tahunan.
3. Rehabilitasi lahan dan penghijauan, khususnya pada tanah-tanah yang terbuka dan kritis.

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Kawasan ini dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman hayati maupun budaya yang merupakan kekayaan wilayah setempat. Di wilayah Kabupaten Tulang Bawang terdapat kawasan suaka alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

a) Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam ini dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan juga mencegah erosi, menjaga fungsi hidrologis, serta ketersediaan unsur hara tanah. Kawasan semacam ini di Kabupaten Tulang

Bawang pernah diidentifikasi berupa rawa-rawa yang berada pada sekitar aliran sungai Way Tulang Bawang yang juga menjadi tempat persinggahan burung migran dari Australia, khususnya di Rawa Pacing. Demikian juga di bantaran Way Seputih. Selain itu juga di ekosistem mangrove (bakau) di sepanjang pantai. Habitat alam di kawasan ini perlu tetap dipertahankan di masa mendatang.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Menetapkan wilayah Rawa Pacing di sekitar Way Tulang Bawang dan area di pinggir Way Seputih sebagai Kawasan Suaka Alam.
2. Membebaskan kawasan suaka alam tersebut dari kegiatan permukiman dan budidaya lainnya yang dapat merugikan kelangsungan fungsi lindungnya.
3. Menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan air permukaan (sungai) dan ketersediaan unsur hara/kesuburan tanah.
4. Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, serta relung ekologi bagi satwa liar (habitat).

b) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan ini dimaksudkan untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, arkeologi, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsi rekreasi. Kawasan ini meliputi area permukiman asli berupa kampung adat Lampung, kompleks makam leluhur Menggala dan tempat bersejarah lain di Menggala serta di Pagar Dewa. Identifikasi secara khusus mengenai pusaka budaya ini perlu dilakukan sejalan dengan upaya revitalisasi kampung tua yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga segenap kehidupan sosial-budaya-ekonomi warga tetap lestari dan terbina.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Menetapkan delineasi area permukiman yang termasuk dalam kawasan cagar budaya, baik sebagai kawasan inti (*sanctuary zone*) maupun kawasan penyangga (*buffer zone*) sesuai dengan maksud dan kaidah pelestarian budaya.
2. Membatasi kawasan cagar budaya ini dari kegiatan budidaya yang mengganggu atau memberi dampak negatif terhadap fungsi perlindungannya.

3. Mengembangkan kegiatan sosial-ekonomi-budaya yang dapat mengangkat kembali kehidupan masyarakat setempat.

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam ini meliputi kawasan rawan banjir yang terletak di daerah aliran air permukaan sekitar Bujuk Tenuk yang selalu melimpas secara periodik.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pemantauan perkembangan kawasan banjir, penetapan klasifikasi tingkat kerawanannya.
2. Pembebasan wilayah tergenang tetap dan wilayah aliran *run-off* rutin dan segala kegiatan budidaya permukiman karena akan menuntut input infrastruktur yang mahal.
3. Untuk bencana banjir ini dibuatkan tanggul-tanggul banjir, saluran drainase, dan penghijauan.

Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya ini adalah bagian wilayah yang dialokasikan terutama untuk memwadahi fungsi-fungsi budidaya seperti pertanian, perkebunan, hutan produksi, pertambakan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan militer (hankam). Kawasan budidaya adalah bagian wilayah Kabupaten Tulang Bawang selain ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

a) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang meliputi pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah dimaksudkan untuk pengembangan tanaman padi, meliputi sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, dan sawah irigasi sederhana maupun tadah hujan. Keseluruhannya mencakup lahan seluas 89.598 ha. Penyebaran pertanian lahan basah meliputi wilayah di Kecamatan-kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Penawar Tama, Gedung Aji, Gedung Meneng, Mesuji, Rawa Jitu Utara, dan Rawa Jitu Selatan.

Pertanian lahan kering dimaksudkan untuk pengembangan tanaman palawija/tegalan, sawah tadah hujan, *agroforestry*, dan hutan rakyat yang mencakup lahan seluas 142.265 ha. Penyebarannya di Kecamatan-kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Way Serdang, Gunung Terang, Banjar Agung, Gedung Aji, dan Penawar Tama.

Bila bendung yang berada di Way Komerling beserta segala sistem irigasinya berhasil direalisasikan, maka alokasi ruang pertanian ini secara khusus perlu ditinjau ulang. Wilayah Tulang Bawang yang termasuk daerah layanannya adalah kecamatan-kecamatan Gunung Terang, Lambu Kibang, Banjar Agung, dan Gedung Aji seluas sekitar 44.500 ha. Namun melihat penggunaan eksisting wilayah-wilayah tersebut sudah berupa pertanian, maka bantuan irigasi teknis ini akan meningkatkan intensifikasi pertanian tersebut termasuk pola tanamnya. Di masa depan, kondisi pertanian yang terbentuk diperkirakan akan mendekati apa yang terjadi di wilayah irigasi Way Rarem (Daya Murni).

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Peningkatan pelayanan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana.
2. Pembatasan penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida.
3. Promosi dan peningkatan penggunaan pupuk organik (pupuk kandang dan pupuk hijau).
4. Mengembangkan dan mencetak petak-petak persawahan baru di daerah rawa-rawa, dengan penerapan teknologi pengelolaan air yang sesuai.
5. Mencegah konversi pertanian lahan basah (sawah irigasi) untuk budidaya bukan pertanian.
6. Peningkatan usaha konservasi tanah baik secara civil teknis, seperti : penyempurnaan teras, pembuatan dam pengendali, dam penahan, dan perlindungan jurang kecil; dan secara vegetatif (penanaman penutup tanah, pertanaman lorong, dan pergiliran tanaman) pada pertanian lahan kering.

b) Kawasan Perkebunan

Kawasan tanaman tahunan atau perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang meliputi perkebunan karet PTP, perkebunan swasta, dan perkebunan rakyat. Perkebunan swasta mencakup lahan seluas 71.921,53 ha, berlokasi di

kecamatan-kecamatan Banjar Agung, Penawar Tama, Gedung Meneng, Tanjung Raya, Mesuji, Rawa Jitu Utara. Perkebunan swasta terutama mengembangkan tanaman karet, kelapa pandan, kelapa sawit, tebu, nanas, dan jeruk.

Adapun perkebunan rakyat dapat dibedakan atas kebun swadaya yang sepenuhnya diusahakan oleh masyarakat dan kebun plasma yang sudah dijalin kerjasama dengan perusahaan inti. Perkebunan rakyat terbesar di lahan milik warga petani maupun tanah ras kampung.

Di Kabupaten Tulang Bawang terdapat tanaman perkebunan rakyat yang berpotensi dan kurang berpotensi. Jenis tanaman perkebunan yang berkurang potensinya di antaranya adalah Jeruk Mesuji (siam) yang ditanam di wilayah Mesuji dan bagian barat kabupaten. Sementara itu tanaman lada juga berkurang potensinya, diantaranya disebabkan oleh kerusakan ekosistem yang membuat prosesnya terganggu sehingga menjadikan kualitas produk berkurang.

Aadapun tanaman perkebunan yang berpotensi diantaranya adalah tanaman karet dan kelapa sawit. Perkebunan tanaman-tanaman ini cukup ramah lingkungan karena tidak eksploitatif terhadap lahan. Tanaman sawit lebih diutamakan karena spektrum penggunaannya lebih luas, serta sekaligus menyongsong tahun 2015 saat bahan bakar *non-renewable* (minyak bumi) mulai krisis. Tanaman karet dikembangkan di wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sisi barat. Sedang kelapa sawit terutama di daerah yang lebih basah/rendah yakni kecamatan-kecamatan Penawar Tama, Gedung Aji, Mesuji, Tanjung Raya, dan Gedung Meneng.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pengembangan tanaman penutup tanah dan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif bagi perkebunan karet milik PTP.
2. Peningkatan perawatan dan pemupukan pada tanaman kelapa sawit dan karet bagi perkebunan rakyat, khususnya kebun swadaya. Sedang untuk kebun plasma melibatkan perusahaan.
3. Peremajaan tanaman lada serta Jeruk Siam bagi perkebunan rakyat.
4. Peningkatan ragam jenis-jenis tanaman perkebunan dan hortikultura yang sekaligus memiliki nilai konservasi.

c) Kawasan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi di samping untuk kegiatan budidaya hasil hutan, juga tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan dibawahnya yaitu untuk mengurangi erosi dan menjaga fungsi hidrologi tanah. Kawasan hutan produksi mencakup lahan seluas 43.100 ha, pada Register 45 (di Kecamatan Mesuji) dan Register 44 (di Kecamatan Gunung Terang) seluas 11.470,92 ha (sebagian berada diluar wilayah adminitrasi Kabupaten Tulang Bawang). Selain itu juga terdapat hutan rakyat seluas 720 ha di Kecamatan Lambu Kibang, Way Serdang, Tanjung Raya, Menggala, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik.

Pada area hutan rakyat meskipun tetap dibudidayakan namun harus memperhatikan kelestarian sumberdaya alam karena menempati lahan yang berfungsi sebagai daerah pengisian air (*recharge area*) bagi daerah dibawahnya. Oleh karena itu pembudidayaan hutan rakyat perlu dilakukan secara hati-hati dengan pengelolaan/penjadwalan masa tebang yang cermat agar fungsinya sebagai daerah pengisian air tetap terjaga.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pemanfaatan ruang beserta sumberdaya hutan dengan cara tebang pilih atau tebang habis tanam, untuk mendapatkan hasil-hasil hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2. Menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan air tanah dan air permukaan, serta mengurangi erosi dan menjaga kesuburan tanah.
3. Mendorong perkembangan usaha dan kesempatan kerja terutama bagi warga masyarakat di sekitarnya.
4. Pengembangan sistem *agroforestry*, seperti : kebun campuran, talun kebun, pertanaman lorong, *silvopasture* (rumput-rumput), dan lainnya.

d) Kawasan Peternakan

Ketersediaan ternak dapat meningkatkan konsumsi protein untuk memperbaiki gizi sehingga kualitas SDM dapat meningkat. Oleh karena itu perlu dibuka peluang pengembang usaha peternakan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan peternakan pada dasarnya melengkapi pengusahaan pertanian yang dilangsungkan di Kabupaten Tulang Bawang. Konsekuensinya secara

keruangan kawasan peternakan berimpit atau bertumpangan dengan kawasan pertanian, khususnya lahan kering. Ternak ruminansia terdiri sapi, kerbau dan kambing serta unggas berupa ayam itik. Kerbau khas Tulang Bawang dikenal karena ukurannya yang besar yang biasa digembalakan secara tradisional dengan dilepas di lahan *padangan*. Adapun untuk wilayah basah, ternak yang mempunyai peluang adalah itik. Pakan dapat diperoleh dengan memanfaatkan sisa-sisa kepala ayam kampung dapat menjadi bagian dan kegiatan ekonomi rumah tangga petani sebagai tabungan hidup.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Melestarikan keberadaan lahan-lahan *padangan* yang merupakan ladang penggembalaan ternak secara tradisional.
2. Mengembangkan sistem usaha peternakan secara intensif, baik ternak besar maupun kecil.
3. Memfasilitasi usaha peternakan tradisional oleh warga masyarakat.

e) Kawasan Perikanan dan Pertambakan

Perikanan merupakan sektor penghidupan yang perlu dikembangkan kembali di Kabupaten Tulang Bawang. Pada masa lalu, wilayah ini dikenal dengan potensinya dalam sejumlah jenis ikan seperti patin, belida, dan jelabat yang berkelas untuk memasok kebutuhan wilayah. Namun produksi perikanan hancur karena pola penangkapan yang salah (seperti menggunakan racun dan setrum), maupun karena adanya limbah pengolahan karet dan kelapa sawit, pabrik tapioka, pupuk kimiawi, serta eksploitasi lahan yang menimbulkan tingkat erosi tinggi. Sektor pertambakan udang juga merupakan primadona ekonomi. Oleh karena itu kawasan-kawasan ini perlu diidentifikasi dan ditetapkan keberadaannya.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pelatihan keahlian penanganan karamba.
2. Pembinaan pengelolaan tambak udang.
3. Penyelamatan dan pelestarian sungai melalui manajemen terpadu antar daerah.
4. Penyediaan tenaga terampil melalui pendidikan kejuruan.

f) Kawasan Industri

Sektor ekonomi produksi yang diharapkan menjadi primadona Kabupaten Tulang Bawang adalah pertanian dan perkebunan, selain juga perikanan. Tidak diproyeksikan berkembangnya industri manufaktur skala besar jumlah yang massif, apalagi terkonsentrasi dalam satu lokasi. Hal itu dikarenakan kapasitas daya dukung alam yang terbatas dan kendala sumber daya alam yang membutuhkan usaha ekstra besar untuk penyediaan infrastruktur. Dengan demikian sebenarnya di wilayah ini tidak diharapkan berkembang industri skala besar dalam satu kawasan. Sekalipun demikian, untuk mengantisipasi dan mengakomodasi kegiatan usaha industri yang berkembang di Kabupaten Tulang Bawang, dapat disiapkan area tertentu yang menjadi tempat pemusatan kegiatan industri. Untuk sepuluh tahun mendatang, pengembangan industri di wilayah ini tidak berupa *industrial estate* skala besar yang dikelola oleh satu manajemen pengusaha kawasan industri, melainkan pada skala wilayah industri (*industrial zone*) dan lokasi industri. Identifikasi dan alokasi ruangnya secara persis tidak ditentukan dalam tingkat perencanaan ini, dan direkomendasikan menjadi bagian dan rencana tata ruang tingkat detil untuk kawasan atau perkotaan tertentu. Khusus industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan diadopsi sistem yang menempatkan industri sebagai bagian dan kawasan pertanian atau perkebunan yang bersangkutan.

Klasifikasi industri dikelompokkan berdasarkan jenis komoditi yang diolah atau dihasilkan, kemudian setiap jenis dibedakan antara industri besar dan menengah serta industri kecil dan rumah tangga. Kelompok industri di Tulang Bawang diprediksikan meliputi industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta industri kimia dan aneka industri yang berhubungan dengan pertanian secara luas. Sedangkan skala industrinya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah investasi dan kapasitas produksi.

Untuk industri besar, lokasi investasi hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, baik dampak sosial maupun dampak terhadap lingkungan fisik dan tata ruang. Lokasi industri besar hendaknya dipilih tidak hanya atas dasar manfaat ekonomi jangka pendek (untuk kepentingan PAD) tetapi juga memperhatikan dampaknya serta aspek perencanaan jangka panjang.

Di samping memperkuat ketahanan ekonomi regional, industri besar diantaranya akan menimbulkan masalah volume lalu-lintas tinggi yang berdampak pada kemacetan, keamanan, polusi (gas/debu, limbah cair/padat, getaran/suara). Di sisi lain industri besar akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan penunjang seperti tempat bongkar-muat, tempat antrean pasokan bahan dan distribusi (tempat parkir yang luas), fasilitas pelayanan seperti toko, warung-warung, rumah-rumah pondokan, bahkan pembukaan permukiman (kampung) baru. Karenanya industri besar direncanakan pada kawasan yang relatif luas tetapi memiliki kemudahan akses kepada jalur transportasi regional maupun nasional agar dampak-dampak berganda seperti di atas tidak merebak. Tipe pengembangan industri besar yang menjadi bagian dari perkebunan seperti halnya PT. Indo Lampung Perkasa (tebu-gula) dan Bratasena (udang) dapat menjadi model.

Industri menengah diarahkan alokasinya pada pusat-pusat permukiman utama seperti wilayah perkotaan Banjar Agung. Sementara itu industri menengah kecil dalam bentuk pabrik mini (*mini plant*) diarahkan tersebar di daerah produksi di semua kecamatan yang sudah relatif berkembang, yakni kecamatan-kecamatan memiliki sumber daya manusia dan bahan mentah hasil pertanian dalam jumlah yang cukup. Kategori ini khususnya mengakomodasi industri pengolahan kelapa sawit (CPO), karet (latex), dan ketela (tapioka). Lokasi persisnya perlu mempertimbangkan permukiman yang ada agar tidak memberikan dampak dalam hal limbah dan polusi udara (bau).

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Memantau perkembangan kegiatan industri yang ada dan mengendalikannya hingga batas kapasitas daya dukung lingkungan.
2. Mempromosikan industri skala kecil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan melalui mekanisme intensif-disinsentif (perpajakan).
3. Mengatur lokasi industri di sepanjang jalan utama kabupaten agar dapat disiapkan segala prasarana pengendali dampak, termasuk terhadap kepentingan lalu-lintas.

g) Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang meliputi wisata alam serta wisata budaya dan bersejarah. Lokasi objek wisata di Kabupaten Tulang Bawang ini terutama berpusat di kawasan Menggala. Saat ini pembangunan di bidang pariwisata baru pada taraf pengembangan gagasan, bersifat politis, dan sporadis. Artinya, potensi yang ada belum dilihat sebagai suatu kesatuan nilai daerah yang biasa dijadikan unggulan. Oleh karena itu pengembangan kawasan pariwisata perlu segera diprogramkan penanganannya secara terpadu. Misalnya, bila kelak *Islamic Centre* telah terwujud dan berfungsi, ini dapat menjadi salah satu atraksi bagi wisata spiritual-religius.

Sementara ini objek wisata potensial yang memungkinkan dikembangkan pada skala kawasan diantaranya adalah :

- Kawasan Wisata Alam, meliputi Wisata Rawa Bujung Tenuk, Rawa Picing, maupun wisata hutan karet di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan syarat keamanan, serta sejumlah waduk dan embung di berbagai kecamatan.
- Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah, yaitu kota lama Menggala yang pernah dikenal "*Paris van Lampoeng*", makam Menak Sangaji leluhur dan perintis Menggala, serta sejumlah kampung asli di berbagai kecamatan semisal Pagar Dewa di antara Way Kiri dan Way Kanan yang bertemu menjadi Way Tulang Bawang.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Menyiapkan peta potensi pariwisata.
2. Mempromosikan potensi kawasan wisata.
3. Mengembangkan atraksi baru di kawasan yang ada.
4. Memantau perkembangan kegiatan pariwisata agar tidak menumbuhkan eksese sosial-budaya dan dampak lingkungan yang negatif.

h) Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tulang Bawang hanya terbatas pada pertambangan bahan galian golongan C berupa lempung, pasir, bentonit, dan material urug. Kawasan ini tersebar di wilayah Kecamatan-kecamatan Tanjung

Raya, Simpang Pematang, Penawar Tama, Lambu Kibang, Banjar Agung, Way Serdang, Mesuji Lampung, Tumijajar, Rawa Jitu Selatan, Menggala, Tulang Bawang Tengah, Gedung Aji. Sedang batubara di wilayah Mesuji diperkirakan masih muda dan kurang potensial untuk diusahakan secara intensif. Ruang pertambangan tersebut pada umumnya tumpang-tindih dengan kawasan sempadan sungai, hutan, maupun pertanian, sehingga perlu dikelola agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dikemudian hari.

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Mengendalikan eksploitasi bahan galian hingga batas kapasitas daya dukung lingkungan.
2. Implementasi SK Bersama Mentamben, Menhut dan Mendagri untuk pengelolaan kawasan yang tumpang-tindih pemanfaatannya.

i) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas permukiman perdesaan dan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan. Bila permukiman perdesaan meliputi area yang mendominasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang, maka kawasan permukiman perkotaan biasanya hanya muncul dan berkembang di sepanjang jalur-jalur transportasi, yaitu di jalan arteri primer, ibukota-ibukota kecamatan, dan beberapa tempat yang strategis. Wilayah yang berkategori kota adalah ibukota kabupaten, semua ibukota kecamatan, ditambah sejumlah permukiman lain yang telah berkembang.

i.1. Permukiman Pedesaan

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun (*built-up area*) maksimum 20% agar tetap tersedia lahan untuk menopang kehidupan perdesaan.
2. Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 30%, agar tetap tersedia kebun pekarangan untuk menjaga kesejahteraan warga.
3. Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan.
4. Pengembangan kampung/desa pusat pertumbuhan.

i.2. Permukiman Perkotaan

Arah Kebijakan Pengelolaan :

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan rasio lahan terbangun 70% agar tetap tersedia ruang terbuka untuk menjaga kualitas kehidupan fisik dan sosial kota.
2. Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB 60%.
3. Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan.

j) Kawasan Militer

Kawasan ini merupakan area atau kompleks khusus dipergunakan untuk kepentingan militer dan terpisah dari permukiman umum/publik. Untuk kepentingan pangkalan dan latihan bagi kesatuan Angkatan Udara tetap dialokasikan ruang yaitu di Astra Ksetra Kecamatan Menggala. Kawasan ini bersifat tertutup dengan pertimbangan untuk keamanan dan keselamatan umum maupun instalasi militer yang terdapat di sana.

IV. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan kabupaten, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten 20 tahun ke depan.

RPJP ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi **TERWUJUDNYA KABUPATEN TULANG BAWANG YANG AMAN, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN**, perlu didukung oleh : (1) Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis, (2) Konsistensi kebijakan pemerintah, (3) Keberpihakan kepada rakyat, dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara efektif.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal November 2008

BUPATI TULANG BAWANG,

dto

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 20 November 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

dto

DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2008 NOMOR